

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontrak Karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Istilah Kontrak Karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata *work of contract*. Menurut Salim H.S., “dalam hukum Australia, istilah yang digunakan adalah *indenture, franchise agreement, state agreement* atau *government agreement*”.¹ Kontrak karya merupakan pintu masuk bagi penanam modal asing yang berkehendak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia.

Salim H.S. mengemukakan bahwa

pada awalnya, pedoman yang digunakan dalam implementasi Kontrak Karya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.²

Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang mengawali eksistensi Kontrak Karya di Indonesia. Pada tanggal 12 Januari 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan dan diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Keberadaan undang-undang tersebut membawa dampak terjadinya perubahan yang signifikan bagi dunia pertambangan mineral dan batubara (pertambangan minerba)

¹ Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 127

² *Ibid.* hlm. 128

di Indonesia. Penghapusan Kontrak Karya menjadi salah satu perubahan yang dominan dalam pengaturan undang-undang baru tersebut.

Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pintu masuk bagi penanam modal asing dalam pertambangan mineral tidak lagi melalui Kontrak Karya, melainkan melalui perizinan. Dengan menggunakan mekanisme perizinan, kedudukan Pemerintah menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan penanam modal asing. Harapannya, Pemerintah akan lebih mampu mengupayakan terwujudnya pengaturan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah menyadari bahwa perubahan rezim Kontrak Karya menjadi rezim perizinan membutuhkan masa penyesuaian, maka Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Mendasarkan pada pengaturan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, meski Kontrak Karya dihapuskan dan digantikan oleh mekanisme perizinan, Kontrak Karya yang telah ada sebelum diundangkannya undang-undang tersebut tetap dihormati keberlakuannya oleh Pemerintah Indonesia. Dari segi waktu, Kontrak Karya yang sudah disepakati tidak akan diputus oleh Pemerintah begitu saja dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga

pelaku usaha pertambangan, terutama penanam modal asing dapat melanjutkan usahanya secara tenang. Meski demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal atas Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, “semua pasal yang terkandung dalam Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang”. Kontrak Karya yang masih dihormati keberlakuannya harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Mekanisme penyesuaian tersebut dikenal dengan renegosiasi.

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam proses renegosiasi Kontrak Karya, terdapat 6 (enam) poin yang harus dibahas, yakni luas wilayah kerja; kelanjutan operasi pertambangan; penerimaan Negara; kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri; kewajiban divestasi; serta penggunaan tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan dalam negeri.³

Berdasarkan siaran pers yang sama pula, “di Indonesia masih terdapat 34 Kontrak Karya yang harus direnegosiasikan guna disesuaikan terhadap pengaturan yang baru”.⁴ Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, status renegosiasi Kontrak Karya hingga tanggal 8 April 2014 adalah sebagai berikut:

1. untuk renegosiasi luas wilayah kerja, 28 sepakat dan 6 tidak sepakat;
2. untuk renegosiasi kelanjutan operasi pertambangan, 24 sepakat dan 10 KK tidak sepakat;
3. untuk renegosiasi penerimaan Negara, 13 sepakat dan 21 tidak sepakat;
4. untuk renegosiasi kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri, 30 sepakat dan 4 tidak sepakat;
5. untuk renegosiasi kewajiban divestasi, 19 sepakat dan 15 tidak sepakat;

³ <http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/7592>, diakses pada 14 September 2015, pukul 11.55 WIB

⁴ *ibid.*

6. untuk renegotiasi penggunaan tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan dalam negeri, 33 sepakat dan 1 tidak sepakat.⁵

Kata sepakat dalam data yang diuraikan di atas ialah sebatas pernyataan awal perusahaan tambang yang bersangkutan dalam tahap awal renegotiasi Kontrak Karya. Perusahaan-perusahaan tersebut menyepakati untuk melakukan renegotiasi terhadap poin-poin yang diuraikan. Kata sepakat tersebut belum dituangkan dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) amandemen Kontrak Karya.

Proses renegotiasi Kontrak Karya tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Dua tahap tersebut, secara berurutan, ialah tahap penandatanganan Nota Kesepahaman amandemen Kontrak Karya dan tahap penandatanganan amandemen Kontrak Karya. Muhammad Syaifuddin berpendapat bahwa

Penandatanganan Nota Kesepahaman amandemen Kontrak Karya merupakan tahap dimana Pemerintah dan perusahaan tambang yang bersangkutan menyatakan adanya persetujuan pendahuluan untuk membuat amandemen kontrak dikemudian hari.⁶

Sedangkan penandatanganan amandemen Kontrak Karya merupakan tahap dimana Pemerintah dan perusahaan tambang yang bersangkutan menyetujui diberlakukannya amandemen Kontrak Karya hasil renegotiasi. Merujuk pada berita pers dalam Laman Pers Rilis Vale dan catatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, “PT Vale Indonesia telah menandatangani amandemen Kontrak Karya sebagai hasil kesepakatan renegotiasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Mineral dan Batubara Tahun 2009 pada tanggal 17 Oktober

⁵ <http://www.esdm.go.id/berita/mineral/43-mineral/6788-28-perusahaan-setuju-renegosiasi.html>, diakses 13 September 2015, pukul 17.39 WIB

⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 168

2014”.⁷⁸ Sementara itu, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, bertempat di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menandatangani 9 Amandemen Kontrak Karya, yakni milik PT. Karimun Granit, PT. Gorontalo Sejahtera Mining, PT. Paragon Perdana Mining, PT. Iriana Mutiara Idenberg, PT. Mares Sopotan, PT. Tambang Tondano Nusajaya, PT. Iriana Mutiara Mining, PT. Sorik Mas Mining, dan PT. Tambang Mas Sangihe.⁹

Jadi, hingga saat ini, baru 10 (sepuluh) perusahaan tambang di Indonesia yang diketahui telah menandatangani Nota Kesepahaman amandemen Kontrak Karya beserta amandemen Kontrak Karya, sedangkan 24 (dua puluh empat) perusahaan sisanya belum menyelesaikan proses renegotiasi Kontrak Karyanya.

Di lapangan, tidaklah mudah untuk melaksanakan kewajiban renegotiasi Kontrak Karya sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Proses renegotiasi kontrak cenderung alot, banyak mengalami hambatan, terlebih dikarenakan kedudukan Pemerintah dalam renegotiasi Kontrak Karya, menurut prinsipnya, ialah sejajar terhadap perusahaan-perusahaan tambang. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, “PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai salah satu perusahaan yang diketahui telah menandatangani Nota Kesepahaman amandemen Kontrak Karya hingga saat ini masih melaksanakan proses renegotiasi Kontrak Karyanya”.¹⁰ Hal tersebut tentunya tidak

⁷⁸http://www.vale.com/indonesia/BH/press/releases/Pages/pemerintah_indonesia_dan_pt_vale_menandatangani_amandemen_kontrak_karya.aspx, diakses 14 September 2015, pukul 12.05 WIB

⁸ <http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/8034-penandatanganan-amandemen-9-kontrak-karya-dan-12-pkp2b.html>, diakses 14 September 2015, pukul 12.05 WIB

⁹ *ibid.*

¹⁰ <http://www.esdm.go.id/berita/mineral>, diakses 14 September 2015, pukul 12.05 WIB

bersesuaian dengan tenggat waktu melaksanakan renegotiasi Kontrak Karya yang ditegaskan dalam Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yakni selambat-lambatnya harus sudah terselesaikan 1 (satu) tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya pertambangan minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta kendala-kendala yang menyebabkan alatnya pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya pertambangan minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang menyebabkan alatnya pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya di lapangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan Minerba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu hukum dalam bidang hukum perjanjian dan hukum pertambangan terkait pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya pertambangan minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus:

- a. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya pertambangan minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- b. untuk mengetahui apa sajakah kendala-kendala yang menyebabkan alotnya pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan Minerba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan Penulis dalam bidang hukum perjanjian dan hukum pertambangan. Wawasan tersebut terkhususkan pada aspek hukum perjanjian dan hukum

pertambangan yang diterapkan dan diperlukan dalam pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya pertambangan minerba di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan informasi bagi Penulis, akademisi, praktisi hukum, serta pihak pelaksana kegiatan pertambangan minerba. Informasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya pertambangan minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta kendala-kendala yang menyebabkan alotnya pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya di lapangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan Minerba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” ini belum pernah dilakukan sebelumnya, akan tetapi terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Hubungan Asas *Pacta Sunt Servanda* dengan Kewajiban Negosiasi Ulang Royalti pada Kontrak Pertambangan (Studi Kasus: Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Company)” yang memiliki pemaparan sebagai berikut:

a. Identitas Penulis : Jesi Karina (0806342415)/ Universitas Indonesia/

Fakultas Hukum/ Program Studi Ilmu Hukum/
Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi

b. Rumusan masalah penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Apakah kewajiban melakukan negosiasi ulang terhadap royalti dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Company yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melanggar asas *Pacta Sunt Servanda*?
- 2) Bagaimana akibat hukum jika kewajiban untuk negosiasi ulang terhadap royalti Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Company tidak dilaksanakan?

c. Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan literatur bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi hukum perikatan dan hukum pertambangan dalam penanganan masalah negosiasi ulang royalti dalam kontrak-kontrak pertambangan.

- 2) Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus:

- a) Untuk mengetahui apakah kewajiban negosiasi ulang royalti dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Company yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melanggar asas *Pacta Sunt Servanda*.

b) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika kewajiban untuk melakukan negosiasi ulang terhadap royalti dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Company tidak dilaksanakan.

d. Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban negosiasi ulang royalti yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Negara yang diamanatkan oleh Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sehingga negosiasi ulang royalti yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat memiliki dasar hukum yang sah. Selain itu, pada pembukaan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Company (KK PTFI) sendiri terdapat sebuah pernyataan yang berbunyi: *“semua sumber daya mineral yang terdapat di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk daerah-daerah lepas pantai, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia.”* Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa para pihak dalam KK PTFI mengakui bahwa semua sumber daya mineral di dalam wilayah hukum Republik Indonesia adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, sehingga KK PTFI juga mengakui dan tunduk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewajiban negosiasi ulang royalti pada KK PTFI tidaklah melanggar asas *pacta sunt servanda* karena sesuai dengan keberadaan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya tunduk kepada apa yang diatur dalam perjanjian tersebut namun juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Sehingga, KK PTFI sebagai suatu perjanjian perdata, juga harus tunduk pada keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan dasar hukum yang sah dalam amanat kewajiban negosiasi ulang royalti KK PTFI.

- 2) Apabila negosiasi ulang royalti pada KK PTFI tidak dilaksanakan maka sebagai akibat hukumnya para pihak dalam KK, yakni Pemerintah Indonesia dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dalam lalu lintas perdata dan PT Freeport Indonesia Company (PT FI) yang menjadi pihak dalam perjanjian telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, yakni amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara agar dilakukan negosiasi ulang terhadap KK PTFI, yang salah satunya mengenai royalti.

Negara sebagai pemegang kedaulatan atas bahan tambang yang diamanatkan oleh rakyat berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dalam hal ini

dapat memberikan sanksi kepada para pihak dalam KK PTFI, karena Kontrak Karya (KK) yang mereka miliki isinya bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UUD 1945. Sanksi yang diberikan Negara dalam kedudukannya sebagai Negara bukanlah sanksi yang secara langsung mencampuri permasalahan negosiasi ulang royalti KK PTFI. Namun, Negara dapat membuat sanksi melalui peraturan perundang-undangan yang tidak hanya bersifat khusus untuk KK PTFI, namun peraturan perundang-undangan yang bersifat umum untuk semua pemegang kontrak pertambangan, misalnya dimana melalui peraturan tersebut PT FI secara otomatis memperoleh dampak langsung dari peraturan yang dikeluarkan tersebut.

Sedangkan Pemerintah Indonesia dalam kedudukannya sebagai salah satu pihak dalam KK PTFI melalui Tim Evaluasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 harus berusaha semaksimal mungkin agar terjadi kesepakatan para pihak dalam pelaksanaan renegotiasi kontrak, namun satu hal yang perlu diingat adalah negosiasi ulang ini juga harus diperhatikan paspek bisnisnya, yakni tidak boleh merugikan salah satu pihak. Pemerintah harus bersikap aktif untuk mewujudkan renegotiasi ini dan tentunya memastikan bahwa penawaran renegotiasi yang diajukan kepada PTFI tidaklah merugikan atau berat sebelah kepada salah satu pihak. Namun,

jika memang setelah diberikan penawaran renegotiasi dengan klausula yang adil dan tidak berat sebelah, PT FI tetap tidak sepakat untuk melakukan renegotiasi KK, maka Pemerintah Indonesia dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dalam lalu lintas perdata memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ini kepada Arbitrase *Ad hoc* yang didasarkan pada klausula arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak dalam KK PTFI, yakni dalam Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa. Pemerintah dapat mengajukan tuntutan kepada Arbiter *Ad hoc* atau Majelis Arbitrase *Ad hoc* untuk memutuskan bahwa negosiasi ulang royalti pada KK PTFI harus dilakukan atau menghentikan KK PTFI. Meskipun *procedure law*-nya menggunakan peraturan UNCITRAL, namun *governing law* arbitrase tersebut akan tetap menggunakan hukum Indonesia sebagaimana disepakati dalam KK PTFI dimana menurut hukum Indonesia sendiri kewajiban negosiasi ulang royalti pada KK PTFI memiliki dasar hukum yang sah, yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta merupakan perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam termasuk sumber daya mineral harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negosiasi ulang royalti KK PTFI yang bertujuan untuk meningkatkan tariff royalti pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Negara yang merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, penolakan untuk melakukan negosiasi ulang berarti telah mengingkari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

2. Penelitian dengan judul “Penyesuaian Isi Kontrak Karya Terkait dengan Penggunaan Jasa Pertambangan” yang memiliki pemaparan sebagai berikut:

a. Identitas Penulis : Toni Rico Siahaan (0806343374)/ Universitas Indonesia/ Fakultas Hukum/ Program Studi Ilmu Hukum/ Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi

b. Rumusan masalah penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana status Kontrak Karya setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
- 2) Ketentuan baru apa saja dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan penggunaan jasa pertambangan yang memengaruhi dalam penyesuaian isi Kontrak Karya?
- 3) Bagaimana penyesuaian ketentuan terkait dengan penggunaan jasa pertambangan dalam Kontrak Karya?

c. Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

Menguraikan mengenai penyesuaian isi Kontrak Karya terhadap ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait dengan penggunaan jasa pertambangan.

2) Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus:

- a) Mengetahui status Kontrak Karya setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b) Mengetahui Ketentuan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan penggunaan jasa pertambangan yang memengaruhi dalam penyesuaian isi Kontrak Karya
- c) Mengetahui penyesuaian ketentuan terkait dengan penggunaan jasa pertambangan dalam Kontrak Karya.
- d. Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
 - 1) Status Kontrak Karya yang telah ada sebelum diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 akan tetap berlaku hingga jangka waktu berakhirnya jangka waktu Kontrak Karya tersebut.
 - 2) Ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan jasa pertambangan yang akan memengaruhi terhadap penyesuaian Kontrak Karya adalah sebagai berikut:
 - a) Pembatasan Bidang Usaha Jasa Pertambangan
Bidang usaha jasa pertambangan dibatasi, yang sebelumnya member kesempatan perusahaan jasa melakukan kegiatan penambangan hingga pengolahan dan pemurnian, tetapi saat ini kegiatan ketiga bidang tersebut hanya untuk konsultasi, perencanaan dan pengujian, sedangkan dalam pelaksanaannya perusahaan pertambangan wajib mengusahakannya sendiri.

b) Kewajiban Penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal

Perusahaan pertambangan dalam hal menggunakan jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan wajib menggunakan jasa pertambangan lokal atau nasional. Sedangkan untuk perusahaan jasa lainnya tetap masih dimungkinkan untuk digunakan, yaitu dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal atau nasional.

c) Tanggung Jawab Penuh dalam Penggunaan Jasa Pertambangan

Tanggung jawab atas penggunaan jasa pertambangan tersebut yang semula ditanggung bersama oleh para pihak dalam Kontrak Karya, tetapi saat ini tanggung jawab penuh berada pada perusahaan tambang yang memegang izin pertambangan. Perusahaan bertanggung jawab secara penuh dan memikul semua resiko atas penggunaan jasa pertambangan.

d) Larangan Penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan yang Terafiliasi

Perusahaan pertambangan dilarang menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang terafiliasi, yaitu yang memiliki kepemilikan saham yang sama secara langsung atas perusahaan jasa yang akan dipergunakan untuk menghindari *transfer pricing* atau *transfer asset* dengan penetapan harga lebih tinggi dari penggunaan perusahaan jasa non-afiliasi.

3) Penyesuaian ketentuan-ketentuan terkait dengan penggunaan jasa pertambangan dalam Kontrak Karya dilakukan dengan mengubah ketentuan lama dalam Kontrak Karya dengan ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, perubahan tersebut ialah sebagai berikut:

a) Pasal Modus Operandi

“Kontraktor menggunakan jasa pertambangan, wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional. Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan perusahaan jasa pertambangan nasional maka dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lainnya yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan dapat menyerahkan kegiatan pertambangan kepada perusahaan usaha jasa pertambangan kecuali untuk kegiatan pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kontraktor menunjuk Perusahaan Jasa Pertambangan yang merupakan afiliasi Kontraktor, maka sebelumnya harus mendapat persetujuan Menteri. Dalam hal kontraktor telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan pelaksanaan penambangan, maka kontraktor diberikan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

b) Pasal Tanggung Jawab Penggunaan Jasa Pertambangan

“Pemerintah memberikan hak kendali dan manajemen tunggal kepada perusahaan atas segala kegiatan berdasarkan perjanjian ini; dan Kontraktor bertanggung jawab penuh serta memikul semua resiko sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian ini. Tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat mempekerjakan usaha jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Laporan-laporan dari perusahaan jasa pertambangan tersebut harus selalu tersedia bagi pengawas-pengawas.”

3. Penelitian dengan judul “Aspek Hukum Renegosiasi Kontrak Karya Perusahaan Multinasional Dikaitkan dengan Konsep Negara Kesejahteraan Ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” yang memiliki pemaparan sebagai berikut:

a. Identitas Penulis : Muhammad Ichsan (110110106001)/ Universitas
Padjajaran/ Fakultas Hukum/ Program Studi Ilmu
Hukum/ Kekhususan Hukum Ekonomi

b. Rumusan masalah penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Apakah akibat hukum dari adanya peninjauan ulang kontrak karya terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia?

- 2) Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam peninjauan ulang kontrak karya dengan perusahaan multinasional agar memenuhi asas keseimbangan ditinjau dengan undang-undang penanaman modal dan undang-undang pertambangan mineral dan batubara?

c. Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan literatur bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi hukum perikatan dan hukum pertambangan terkait aspek hukum renegotiasi kontrak karya perusahaan multinasional dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan ditinjau dengan undang-undang penanaman modal dan undang-undang pertambangan mineral dan batubara.

2) Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus:

- a) Untuk mengetahui apakah akibat hukum dari adanya peninjauan ulang kontrak karya terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.
- b) Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam peninjauan ulang kontrak karya dengan perusahaan multinasional agar memenuhi asas keseimbangan ditinjau dengan undang-undang penanaman modal dan undang-undang pertambangan mineral dan batubara.

d. Hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

Peninjauan ulang kontrak karya dapat dilaksanakan dengan adanya permasalahan pertambangan saat ini agar Pemerintah dapat memperoleh nilai tambah dari adanya kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan, dan untuk menegaskan kedaulatan Indonesia atas kekayaan alam dan untuk perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia melalui usaha pertambangan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan perbaikan terhadap klausul kontrak karya perusahaan multinasional yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perbaikan klausul tersebut dilakukan dalam hal pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, divestasi saham perusahaan, peningkatan nilai *royalty*, penggunaan barang dan jasa dalam negeri, tenaga kerja Indonesia, perlindungan terhadap masyarakat sekitar pertambangan, dan pengalokasian dana secara bertahap oleh perusahaan untuk kegiatan pasca tambang.

F. Batasan Konsep

1. Renegosiasi Kontrak Karya

Dalam lingkup bidang pertambangan mineral dan batubara, berdasarkan pengaturan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, renegosiasi kontrak karya ialah mekanisme penyesuaian semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya yang masih dihormati keberlakuannya terhadap Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaanya serta peraturan perundang-undangan terkait.

2. Pertambangan

Menurut bahasa sehari-hari, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertambangan ialah urusan (pekerjaan dsb) yang berkenaan dengan lombong (cebakan, parit, lubang di dalam tanah) tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batu bara, dsb. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

3. Minerba

Minerba ialah akronim dari mineral dan batubara. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas:

- 1) pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah;
- 2) doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum;
- 3) dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, dan statistik dari instansi/lembaga resmi;
- 4) narasumber, yakni subjek/seseorang yang berkapasitas sebagai professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat

hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber dipergunakan dalam penelitian normatif atau empiris.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, cara pengumpulan data yang dipergunakan ialah:

- a. Untuk memperoleh data primer, data diperoleh dari wawancara.
- b. Untuk memperoleh data sekunder, data diperoleh dari studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer yang sudah dipergunakan:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum;
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- h) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan;
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - l) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 2) Bahan hukum sekunder yang dipergunakan:
- a) pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah;
 - b) doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum;
 - c) dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, dan statistik dari instansi/lembaga resmi; dan
 - d) narasumber.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Jakarta, di kantor-kantor administratif responden yang bersangkutan.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian tidak harus meneliti semua objek (populasi),

tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan disertai argumentasi.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi dengan menggunakan metode purposive random, bola salju, dan sebagainya. Prosentase sampel tergantung besarnya populasi. Apabila populasi jumlahnya terbatas, maka tidak diperlukan seluruh populasi dijadikan sampel.

7. Responden

Responden adalah subjek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Responden dari penelitian ini ialah:

- a. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. PT Vale Indonesia;
- c. PT Newmont Nusa Tenggara;

8. Analisis Data

Proses pengolahan data antara lain mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel, prosentase, jumlah, grafik, dan sebagainya.

- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normative. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- c. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.